

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT  
DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA  
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

RETNO WULAN ANGRAENI

0941010017

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2013

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI *E-PROCUREMENT*  
DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA  
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**Disusun oleh :**

**RETNO WULAN ANGRAENI**  
**NPM . 0941010017**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui**

**Pembimbing**



**Dr. Lukman Arif, M.Si.**  
**NIP. 196411021994031001**

**Mengetahui**

**W.S DEKAN**



**Dra. SUMARDJIJATI, M.Si**  
**NIP. 196203231993092001**

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI *E-PROCUREMENT*  
DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA  
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Oleh :

**RETNO WULAN ANGRAENI**  
**0941010017**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 18 Juni 2013


Menyetujui,

Pembimbing Utama

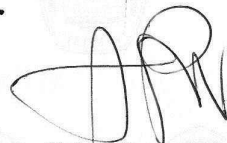
Tim Penguji :

1.

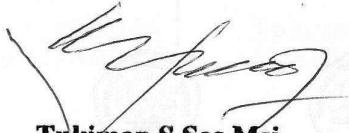
  
**Dr. Lukman Arif, MSi**  
**NIP. 196411021994031001**

  
**Dr. Lukman Arif, MSi**  
**NIP. 196411021994031001**

2.

  
**Dra. Sri Wibawani, MSi**  
**NIP. 196704061994032001**

3.

  
**Tukiman S. Sos, Msi**  
**NIP. 1961032319890310**

Mengetahui,

**W.S Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

  
**Dra. SUMARDJATI, M.Si**  
**NIP. 196203231993092001**

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI *E-PROCUREMENT*  
DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA  
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**Nama** : Retno Wulan Angraeni  
**NPM** : 0941010017  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

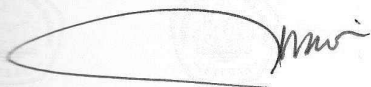
**Menyatakan bahwa Skripsi ini telah direvisi dan disahkan  
Pada tanggal 18 Juni 2013**

**Mengetahui / Menyetujui,**

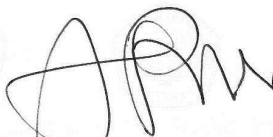
**Dosen Penguji I**

**Dosen Penguji II**

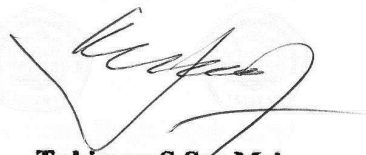
**Dosen Penguji III**



**Dr. Lukman Arif, Msi**  
**NIP.196411021994031001**



**Dra. Sri Wibawani M.Si**  
**NIP. 196704061994032001**



**Tukiman S.Sos, Msi**  
**NIP.1961032319890310**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA”.

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis masih banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak DR. Lukman Arif, MSi, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. Teguh Sudarto MP Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak DR. Lukman Arif, MSi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas bimbingan dan didikannya selama ini.

5. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan segala yang mereka bisa, baik berupa dukungan dan semangat.
6. Dwi Mulya Amansyah yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua teman – teman jurusan Administrasi Negara angkatan 2009.
8. Dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Mei 2013

Penulis

# Persembahan :

Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah turut membantu sehingga melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima

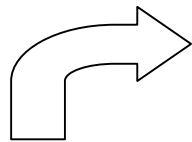
kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dorongan baik doa, motivasi, biaya serta semangat, semoga ALLAH SWT terus memberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amiennn....
2. Kakakq Randy dan mbak iparq kiky serta ponakanq yang ayu dewe n imut dewe... J
3. Dwi Mulya Amansyah makasi udah ngasi dukungan dan semangat untuk nyelesaiin skripsi ini. Luv u sayankk...<3
4. Buat semua teman2 Administrasi Negara angkatan 2009.aq pazti kangen sama kalian semua. Miss u all... L

“Sekali lagi terima kasih sebesar – besarnya untuk semuanya serta mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja”



## J Foto Kenangan waktu PKL J



**PKL di Malang**



**PKL di  
BALI**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II   KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	16
2.2. Landasan Teori .....	19
2.2.1. Konsep Pelayanan Publik .....	19
2.2.1.1. Definisi Pelayanan .....	19
2.2.1.2. Definisi Pelayanan Publik .....	20
2.2.1.3 Tujuan Pelayanan .....	21
2.2.2 Electronic Government (e-government) .....	22
2.2.2.1 Manfaat E-Government .....	24
2.2.2.2 Tujuan E-Government .....	24
2.2.2.3 Sasaran Pembangunan E-Government .....	25
2.2.3 Good Governance .....	25

2.2.4	Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	30
2.2.5	Efektivitas dan Efisiensi .....	32
2.3.	Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Jenis Penelitian .....	35
3.2.	Lokasi dan Situs Penelitian .....	36
3.3.	Fokus Penelitian .....	36
3.4.	Sumber dan Jenis Data .....	37
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6.	Analisa Data .....	40
3.7.	Teknik Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
4.1.1	Lokasi Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	43
4.1.2	Sejarah Singkat Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	43
4.1.3	Visi dan Misi Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	44
	4.1.3.1 Visi .....	44
	4.1.3.2 Misi .....	44
4.1.4	Struktur Organisasi Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	44
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	46

4.1.6	Komposisi Pegawai Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya .....	47
4.1.7	Syarat – syarat Mengikuti Lelang .....	50
4.1.8	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lelang.....	50
4.2	Hasil Penelitian .....	50
4.2.1	Efektivitas E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa.....	52
4.2.2	Efisiensi E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa .....	59
4.3	Pembahasan .....	63
4.3.1	Efektivitas E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa .....	63
4.3.2	Efisiensi E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	70
5.2	Saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Pangkat Golongan .....	49
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana .....	49
Tabel 4.5 Data Rekap Anggaran Lelang Melalui E-Procurement tahun 2004 - 2012 .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 3.1	Analisa Data Model Interaktif Menurut Miles dan Hubernman .	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	44
Gambar 4.2	Alur Tahapan Lelang .....	53
Gambar 4.3	Portal E-Procurement .....	55
Gambar 4.4	Pemenang Lelang .....	57
Gambar 4.5	Informasi Lelang .....	58
Gambar 4.6	Efisiensi Lelang .....	60
Gambar 4.7	Jadwal Tahap Lelang .....	62

## ABSTRAKSI

### RETNO WULAN ANGRAENI. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT DALAM PROSES PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Penelitian ini didasarkan pada fenomena masih sering terjadinya praktek korupsi di struktur tubuh birokrasi . Banyak cara yang telah dilakukan guna meminimalisir kegiatan penyelewengan penyelenggaraan pemerintah di tubuh birokrasi. Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata dengan adanya e-procurement ini dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui e-procurement, lelang menjadi terbuka. Maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana efektifitas dan efisiensi e-procurement dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hal diatas, maka dibuatlah rumusan masalah penelitian “Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi e-procurement dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintahan di pemerintah Kota Surabaya?”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. dengan fokus penelitian dua hal yaitu : pertama, efektifitas proses pelelangan. Kedua, efisiensi dalam hubungan menghemat biaya dan waktu. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan reduksi data, display data, instrument penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan di lapangan dan koneksi internet.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah yang pertama efektifitas E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa, yang merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Yang kedua yaitu efisiensi E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa, yang merupakan upaya untuk menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya.

Kata kunci: Efektifitas, Efisiensi, E-Procurement



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1`Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bergesernya manajemen pemerintahan dari Old Public Administration (OPA) ke New Public Management (NPM) melalui penekanan pada pelayanan yang lebih berorientasi kepada masyarakat hendaknya dijadikan landasan di dalam pengelolaan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar, 1998 : 5). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pemerintah hendaknya selalu berorientasi pada masyarakat dengan menerapkan konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat (community based service).

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Serta untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN

dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pada jalur yang benar, memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan investasi dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat luas (masyarakat dan swasta).

Permasalahan-permasalahan pembangunan di Indonesia saat ini masih berakut dengan pemulihan ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, tingkat kesejahteraan rakyat, birokrasi pemerintahan kurang efisien dan efektif sehingga memberi peluang terjadinya korupsi, sampai pada permasalahan disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa.

Peran organisasi publik dalam hal ini birokrasi juga menjadi sorotan terhadap munculnya permasalahan pembangunan. Idealnya sebuah birokrasi pemerintahan seharusnya senantiasa memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan terhadap publik yang efisien dan efektif, transparan serta akuntabel. Namun kenyataan yang terjadi adalah ketika birokrasi telah memiliki wewenang terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada justru birokrasi dapat memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan dengan menyelewengkan dan melampaui wewenang dari tugas birokrasi tersebut. Sehingga menyebabkan praktek korupsi dan kolusi yang terjadi di tubuh birokrasi

pemerintahan semakin subur dan bertambah besar. Kondisi ini yang menekankan pentingnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Penyelenggaraan good governance ini akan dapat menekan penyelewengan proses pemerintahan oleh birokrasi dimana komponen terpenting dalam good governance ini adalah terciptanya kinerja pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan serta akuntabel. Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menjadi mutlak adanya. Masyarakat dalam hal ini sebagai stakeholders yang penting dalam pembangunan menginginkan adanya penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, transparan serta akuntabel.

Terbentuknya bentuk pemerintahan yang baik seperti diatas membutuhkan komitmen yang besar, mulai dari sikap moral sampai pada sarana penunjang terciptanya good governance. Salah satu sarana penunjang yang dapat mendukung terselenggaranya good governance adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemerintah akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ini akan dapat memperbaiki pelaksanaan program pemerintah yang selama ini kurang efektif dan efisien sehingga ini akan membantu tercapainya kinerja birokrasi/instansi pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Dan disinilah letak pentingnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya good governance.

Good governance berorientasi pada orientasi ideal sebuah negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan orientasi pada pemerintahan yang

berfungsi secara efisien dan efektif melakukan apa yang menjadi tujuan nasional tersebut. Orientasi pertama lebih mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan dengan elemen-elemen konstituennya seperti legitimacy, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution power serta assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua adalah tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sebagaimana struktur, mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efisien dan efektif. (Windyastuti, 2001 : 8)

Kemudian salah satu karakteristik terwujudnya good governance adalah terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Mardiasmo, 2002 : 29) Ketika hal tersebut terbukti maka sebenarnya kinerja pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tiga pilar utama good governance, yaitu masyarakat luas, pasar atau swasta, dan pemerintah sendiri.

Seiring dengan kebutuhan birokrasi terhadap informasi dan data global yang sedang berkembang. Media internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi yang membantu manusia guna berinteraksi satu sama lain sama tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan media internet ini manusia dapat berinteraksi bahkan bertransaksi dengan mudah dan cepat, sehingga segala urusan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan mudah tanpa harus terhambat oleh adanya jarak dan ruang. Dunia maya ini diyakini mempengaruhi kehidupan manusia, menghapus jarak, ruang, budaya, dan menjadi jembatan sosial masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. (Turnip Kaiman, 2003 : 66)

Perkembangan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan diikuti dengan berubahnya pola orientasi dan fokus pemerintahan yang menaruh pelayanan publik sebagai fokus utama dalam jalannya pemerintahan. Bentuk orientasi terhadap pelayanan publik ini muncul seiring dengan arus reformasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap bentuk ideal sebuah pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Hal ini yang mendorong tuntutan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan yang harus mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar pembangunan. Dengan maksud meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan berkembangnya teknologi informasi khususnya media internet maka mulai muncul istilah *electronic government* atau *e-government*.

Dengan adanya *e-government* maka informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan tanpa batasan waktu dimana dapat diakses melalui internet selama 24 jam dan membuka akses informasi yang sebesar-besarnya. *E-government* juga akan mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mudah dikelola dan diawasi dan memastikan semua sumber daya pemerintah digunakan sesuai dengan skala prioritas. (Sumber : Kompas, 15 Desember 2005)

Esensi terpenting dari *e-government* adalah pemanfaatan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam konteks ini peningkatan kinerja diartikan sebagai terciptanya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelola internal maupun dalam pelayanan

kepada publik. Salah satu komponen utama e-government adalah implikasi sistem pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui internet. Aplikasi ini memberi fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggaraan layanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung. (Mas RS Wigrantoro: 2005).

Berdasarkan Keppres no 30 Tahun 1997 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), dan disusul dengan Keppres No 50 Tahun 2000 dimana didalamnya disusun kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia. Keppres ini yang kemudian mendasari munculnya Inpres No 6 Tahun 2001 yang didalamnya menyatakan bahwa aplikasi E-government yang diterapkan diseluruh organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah selain memberikan pelayanan dalam bentuk informasi namun juga agar dikembangkan guna pelayanan interaktif, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui internet sebagai bentuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Setelah berjalan selama sekitar dua tahun dan muncul kebijakan baru mengenai e-government yaitu Inpres No 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Dalam Inpres ini diatur secara lebih lengkap dan detail mengenai pengembangan e-government mulai pada pemerintah tingkat pusat sampai pada pemerintah tingkat daerah/kota. Tujuan pengembangan e-government ini yaitu merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.



Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat semaksimal mungkin efektifitas dan efisiensi kinerjanya karena sangat terbantu oleh perkembangan e-government di pemerintahan dan masyarakat sendiri akan lebih mudah mengakses bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan aparatur birokrasi tanpa harus melewati proses yang rumit. Dari asumsi dasar tersebut penulis menemukan dan mencoba akan mengkaji sebuah bentuk penerapan teknologi informasi yang berbentuk e-government sebagai upaya menciptakan tatanan pemerintahan yang baik atau good governance yang ada di pemerintah Kota Surabaya.

Fenomena tersebut berasal dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat umum dalam hal ini pihak swasta. Biasanya dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya dimana pengadaan ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap perorangan atau perusahaan oleh pemerintah Kota Surabaya. Mekanisme lain - lain adalah melalui proses pelelangan secara langsung terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kota Surabaya.

Salah satu persoalan yang terjadi saat ini adalah masih sering terjadinya praktek korupsi di stuktur tubuh birokrasi . Banyak cara yang telah dilakukan guna meminimalisir kegiatan penyelewengan penyelenggaraan pemerintah di tubuh birokrasi. Salah satu pendekatan yang gencar dilakukan sekarang adalah dipilihnya penerapan pemanfaatan telematika dengan bentuk e-government dalam hal ini e-procurement sebagai salah satu alat untuk memotong tindak korupsi

struktural yang terjadi, termasuk indikasi penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. (Mas RS Wigrantoro : 2005)

Menurut Dewan Pembina IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Pusat Agus Rahardjo yang bertugas mendukung kinerja LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), yaitu mensosialisasikan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah, mengaku sampai saat ini ada sekitar 80% kasus korupsi terjadi karena proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Namun tidak semua para tersangka itu sengaja untuk berniat curang atau korupsi, sebab ada beberapa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak memahami aturan main proses pelelangan.

Dalam fenomena ini menariknya pemerintah Kota Surabaya mencoba melakukan terobosan baru dalam teknologi informasi dalam pemerintahan yang berupa e-government guna memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa terhadap proyek-proyek pembangunan Kota Surabaya melalui pelelangan secara online. Sarana ini yang kemudian dikenal dengan bentuk e-procurement. Modul e-procurement ini sebagai salah satu komponen e-government yang merupakan salah satu kontribusi yang ditawarkan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan atau terjadinya tindak korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E-procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman

pemenang pelelangan secara online. Misi akhir dari penerapan E-Procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang waktu dan biaya (Indrajit dkk, 2002 : 151). Jadi seluruh proses pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat dengan menggunakan aplikasi e-procurement secara online dengan harapan ini akan membantu terwujudnya efektifitas dan efisiensi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya terciptanya good governance.

E-Procurement dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui e-procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid tidak terhindari adanya permainan-permainan pula dalam praktik e-procurement. Penggunaan e-procurement secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, e-procurement dapat menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar. (Sumber : Republika, 21 Juni 2009)

Selain itu, ada sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi tanpa e-procurement antara lain: Pertama, tender arisan; Kedua, suap untuk memenangkan tender; Ketiga, proses tender tidak transparan; Keempat, supplier bermain mematok harga tertinggi (mark up); Kelima, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; Keenam, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu

pelaku usaha tertentu; Ketujuh, adanya almamater sentris; Kedelapan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; Kesembilan, tender tidak diumumkan; Kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah (Sucahyo dkk, 2009)

Dalam pelaksanaan pembelanjaan anggaran belanja daerah sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-proyek pemerintahan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (pelelangan) dari kebutuhan pemerintah daerah yang didanai oleh APBD disadari memang sering terjadi penyalahgunaan anggaran. Kebocoran dana pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 10% sampai 50% karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat rawan KKN.( Sonhaji Agus Imam : 2005)

Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan transparan dan akuntabel maka akan dapat mengefisien anggaran dan mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kota Surabaya. Ini menggambarkan betapa pentingnya posisi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dan ini yang menjadi alasan penting mengapa e-procurement dimunculkan dengan harapan terciptanya transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pelelangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan (e-procurement) telah diterapkan pada beberapa Departemen dan Institusi pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah Departemen Kimpraswil, Bappenas, Departemen Kominfo. Satu-satunya instansi pemerintahan daerah saat ini yang tengah menerapkan e-procurement adalah pemerintah Kota Surabaya. Sistem pelelangan melalui internet ini berawal dari sering terjadinya proyek-proyek pemerintah Kota Surabaya tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditetapkan, padahal rata-rata harga proyek dari pemerintah kota tersebut tergolong cukup tinggi. Dari sini maka muncul ide penerapan lelang serempak melalui media internet dengan harapan sistem ini akan menjadikan proses tender dan lelang menjadi transparan dan akuntabel karena semua pihak bisa mengikuti secara terbuka dan menimalisir praktek kolusi.

Sampai saat ini penyelenggaraan e-procurement di pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan lama dan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat Surabaya khususnya adalah para pengusaha baik perorangan atau perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan. Kebijakan memunculkan pelelangan pengadaan barang dan jasa ini didasarkan pada Keppres no 80 tahun 2003 Bab IV Bagian D, dan selanjutnya diatur dalam Perpres no 54 tahun 2010 yang telah berubah kedua kali dengan Perpres no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Sistem e-procurement sudah menjadi terobosan penting dalam pengadaan barang dan jasa. Namun pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya,

seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e-procurement serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran et al, 2009). Selain itu dalam pelaksanaannya di beberapa daerah terdapat keluhan bahwa sistem komputer untuk e-procurement sering macet di saat menjelang deadline tender (Rahardjo, 2010). Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang masuk dikarenakan para peserta lelang menunggu hingga menjelang batas akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi karena takut penawarannya dibocorkan ke pihak lain.

Pemerintah Kota Surabaya menjadi instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan pelelangan dengan sistem e-procurement. Sistem e-procurement mulai digunakan sejak pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2004. Ide ini mulai dikembangkan dari pelaksanaan lelang serentak pada tahun 2003 dimana keterbukaan (transparansi), keadilan, efektifitas dan efisiensi menjadi unsur utama untuk mewujudkan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2007 telah mulai menerapkan 99% full e-procurement sampai dengan saat ini. Penerapan e-procurement pada Pemerintah Kota Surabaya telah diakui keberhasilannya oleh banyak pihak. Tetapi untuk mendukung kualitas layanan publik yang diharapkan terus meningkat, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Aplikasi e-procurement ini sebenarnya ternyata telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) bagi Sekretariat layanan e-procurement. Selain itu



layanan e-procurement ini telah mendapatkan penghargaan dari Jawa Post Institute of Pro-Otonomi (Region in a Leading Profile on Public Accountability) dan dari majalah Warta Ekonomi (e-government Award). (Bachrudin Effendi : 2006)

Standart Internasional (ISO 9001:2000) ini mengukur apakah sebuah organisasi atau perusahaan dapat membentuk sistem manajemen yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen/stakeholders.

Mengenai efektifitas dan efisiensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan memang mutlak adanya dan tidak bisa ditawar lagi. Ini didasarkan pada realitas penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi di Indonesia yang cenderung kurang memperhatikan dan masih jauh dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini berpengaruh besar terhadap orientasi penyelenggaran pemerintahaan yang memang ditujukan pada pelayanan publik yang bersih, transparan, dan ringkas.

Yang menjadi kajian sekarang adalah apakah memang e-procurement benar-benar sebagai bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya. Tanpa mengurangi rasa skeptis, masyarakat seharusnya perlu mengetahui proses pelelangan barang/jasa melalui media internet ini. Agar e-procurement benar-benar berjalan efektif yaitu masyarakat memantau supplier mana saja yang memasukkan penawaran. Lalu setelah secara internal diputuskan pemenang maka hasilnya dibuka kepada publik, supplier mana yang menang, berapa nilai penawarannya dan rata-rata berapa selisih

penawarannya dengan supplier lainnya.(Sonhaji Agus Imam:2005) Disadari bahwa sistem tender yang pernah dilakukan di Indonesia lazimnya membuka adanya “kongkalikong” atau kolusi antara peserta dengan penyelenggara lelang dalam pengajuan penawaran harga. Calon pemenang lelang tersebut sudah disiapkan dan juga sudah disiapkan siapa yang kalah. Dari fenomena ini semakin menjadikan tantangan apakah memang e-procurement ini telah membuktikan sebagai bagian dari media yang efektif dan efisien guna terciptanya bentuk layanan e-government yang ideal dan terwujudnya good governance.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana efektifitas dan efisiensi e-procurement dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintahan di pemerintah Kota Surabaya?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai data yang diperoleh mengenai efektifitas dan efisiensi dari program e-procurement yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori. Sehingga dapat menjadi bekal saat penulis terjun secara langsung ke dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topic penelitian penulis dan merupakan sumbangan pemikiran bagi kampus UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai wujud terima kasih penulis selama menempuh pendidikan sarjana.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi perpustakaan bagi mahasiswa.